

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahasiswa dikenal eksistensinya sebagai intelektual muda yang merupakan lapisan elite ditengah masyarakat dengan berbagai predikat. Predikat tersebut di antaranya dikemukakan oleh Raillon (1989: 140-194) bahwa “mahasiswa sebagai pembela kemurnian, keadilan dan kebenaran, perintis renovasi dan agen pembaharu, serta pelopor pembangunan”. Mahasiswa juga lebih populer disebut Saidi (1989: 29) “sebagai salah satu pemeran *social control* yang paling terdepan”. Menurut Culla (1999: 8-9) bahwa “mahasiswa sebagai aktor atau ujung tombak perubahan sosial dan politik, karena merekalah kekuatan sosial yang amat responsif terhadap kondisi struktur politik”. Kemudian menurut Jumadi (2009: 120) bahwa :

Mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat terhadap alur dan logika penguasa dan sebaliknya sebagai penyampai kebijakan penguasa terhadap komunitas umum, demi terciptanya alur kehidupan yang dinamis dan seimbang antara pengambil kebijakan dengan obyek kebijakan.

Sementara Yoedhanegara (2005: 23) bahwa “mahasiswa sebagai kekuatan moral (*moral force*)”, yang menjadikannya berada pada posisi yang terpendang dan terhormat dibanding kaum muda lainnya dimasyarakat.

Dari berbagai macam predikat mahasiswa di atas, hanyalah bagian dari sisi positif eksistensi mahasiswa. Predikat tersebut merupakan harapan dan tanggung-jawab kesejarahan yang dibebankan kepada mahasiswa, terutama perannya dalam

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

mengawal perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Sementara sisi negatifnya, mahasiswa dipandang sebagai kelompok masyarakat yang sering mengganggu ketenangan dan kepentingan masyarakat umum, seperti diantaranya perilaku kekerasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi. Perilaku kekerasan tersebut, kemudian menuai protes, antipati dan kegelisahan bagi berbagai elemen masyarakat yang akhirnya membuat stigma buruk kepada mahasiswa itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Yoedhanegara (2005: 25) bahwa :

Demonstrasi tidak lagi merupakan gerakan moral mahasiswa yang murni atas dasar keinginan nurani yang terpanggil, sebab gerakan moral selalu membawa perasaan orang banyak dan akan memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat.

Perilaku kekerasan mahasiswa dalam demonstrasi sudah menjadi fenomena sosial dalam penyelesaian sebuah masalah, seperti penyerangan terhadap aparat hukum, pengrusakan fasilitas publik, membakar kendaraan, penjarahan, pemblokiran jalan umum, dan lain sebagainya. Keadaan demikian, menurut Kurtines dan Gerwitzs (1992: 395) dikatakan sebagai “salah satu perilaku anti sosial”.

Perilaku kekerasan tersebut dilatar belakangi antara lain: *Pertama*, banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat membuat mahasiswa banyak kecewa. Maksudnya perilaku kekerasan mahasiswa dalam demonstrasi merupakan ekspresi kekecewaan akibat ketidakadilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Ketidakadilan tersebut, mengakibatkan kesenjangan hidup antara orang kaya dan orang miskin semakin jauh, hukum hanya berpihak

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kepada orang yang memiliki uang dan kekuasaan semata, kebebasan berpolitik hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, dan lain sebagainya. Sebagaimana dikemukakan Culla (1999: 9) bahwa:

Pemicu kahadiran gerakan mahasiswa karena tidak berfungsinya secara maksimal infrastruktur dan suprastruktur politik negara, adanya penindasan struktural, dan kemudian krisis sistemik dibawa rezim pemerintahan, itulah yang mendorong gerakan mahasiswa melakukan fungsi kritisnya diluar jalur resmi.

Maksudnya munculnya demonstrasi mahasiswa karena pemerintah tidak dapat mengatur pemerintahan secara baik, bahkan semakin buruk keadaannya, terutama isu krusial seperti isu sosial, ekonomi, politik, dan hukum sehingga mendorong terjadinya perilaku kekerasan. Keadaan tersebut sangat jauh dari cita-cita dan harapan bangsa Indonesia, sebagaimana menurut Wahab dan Sapriya (2011: 19) bahwa “harapan dan tujuan dari pemerintahan yaitu diantaranya keadilan, kesejahteraan umum, ketertiban, dan kebebasan”.

Kedua, perilaku aparat pemerintah yang kurang memberikan keteladanan. Maksudnya perilaku kekerasan mahasiswa dalam demonstrasi dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang telah mengkhianati amanah rakyat, seperti masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mafia peradilan, dan lain sebagainya yang banyak terjadi dikalangan pejabat pemerintah, akhirnya melahirkan krisis kepercayaan dikalangan rakyat itu sendiri. Sebagaimana Huntington (2001: 340) kemukakan bahwa “salah satu perilaku kekecewaan yang berkembang pada sistem-sistem demokrasi yaitu kekecewaan mewujud dalam reaksi menentang pemerintah yang sedang berkuasa”.

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Ketiga, pemerintah sangat lambat dalam merespon setiap aspirasi mahasiswa yang positif. Maksudnya perilaku kekerasan terjadi akibat dari ketidakpuasan, kekecewaan, dan rasa frustrasi mahasiswa kepada pemerintah yang lamban dalam mengakomodir dan merespon setiap aspirasi yang disampaikan ketika demonstrasi berlangsung. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nasikun (Jumadi, 2009: 56) yang menjelaskan bahwa :

Adanya sumber struktural sebagai penyebab mendasar terjadinya kekerasan kolektif. Adanya pemusatan kekuasaan dan kemunduran otoritas kekuasaan di tingkat pusat dan tingkat masyarakat, dipandang tidak lagi mampu menyerap dan memenuhi aspirasi kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan modern.

Keempat, kekerasan telah dianggap mahasiswa sebagai alat untuk mencapai tujuan demonstrasi. Maksudnya kekerasan mahasiswa dalam demonstrasi terjadi agar tuntutan aspirasi secepatnya dapat dipenuhi oleh pihak yang menjadi sasaran atau obyek demonstrasi, sebagaimana yang dikemukakan Culla (1999: 32) bahwa “ciri khas pemuda yang cenderung radikal, romantis, dan terkadang revolusioner, ingin segalanya cepat”, akhirnya kekerasan menjadi alat (*instrument*) untuk mencapai tujuan, yang menurut Berkowitz (1995: 29) disebut sebagai agresi instrumental yaitu ”dimana serangan pada pokoknya merupakan upaya untuk mencapai tujuan, selain menyakiti atau menghancurkan sasaran”. Kemudian juga dikemukakan Machiavelli (Haryatmoko, 2003: 95) bahwa “hukum tanpa pedang tidak akan ditaati, demikian pula pendapat tanpa dukungan kekuatan yang menekan tidak akan didengarkan”.

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Perilaku kekerasan mahasiswa di Kota Makassar sudah berlangsung cukup lama dan sudah merupakan fenomena biasa terjadi di daerah tersebut. Dari data yang didapatkan di lapangan melalui pra-observasi pada Juli 2011, sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2011, terjadi 14 peristiwa demonstrasi pada isu nasional, regional, dan sektoral dengan mengakibatkan kerugian materil maupun non materil :

“Pertama, isu nasional antara lain: (1) penuntasan kasus Bank Century sepanjang Januari sampai dengan Desember 2010, (2) peringatan Hardiknas 2 Mei setiap tahun untuk menolak komersialisasi pendidikan, (3) peringatan hari anti korupsi internasional 9 Desember 2010, (4) aksi demonstrasi dalam rangka peringatan 100 hari pemerintahan SBY-Budiono pada 5 Januari 2010. Kedua, isu regional diantaranya: (5) penuntasan kasus penembakan mahasiswa dan dosen di UNASMAN Sulbar oleh aparat kepolisian, (6) aksi penolakan terhadap peraturan daerah tentang tata kelola wilayah. Ketiga, isu sektoral diantaranya: (7) aksi penolakan aturan kemahasiswaan dan akademik yang membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berorganisasi; dan (8) aksi penolakan bentuk-bentuk praktek komersialisasi pendidikan dalam kampus” (BEM UNM : 2011).

Keunikan atau kekhasan demonstrasi mahasiswa Kota Makassar dibandingkan dengan daerah lain yaitu: *pertama*, intensitas demonstrasi yang tinggi dalam merespon berbagai isu sosial politik yang terjadi di daerah maupun di pusat; *kedua*, apresiasi massa demonstrasi yang ditunjukkan dengan jumlah massa yang besar pada saat demonstrasi berlangsung; dan *ketiga*, setiap kali melakukan demonstrasi yang terkait isu sosial politik, sangat berpotensi besar bagi mahasiswa untuk bertindak kekerasan. Keadaan tersebut menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 166) termasuk ke dalam salah satu krisis nilai dan moral.

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Keadaan demikian oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harusnya dapat menangani secara khusus peristiwa tersebut, melalui aparat hukum yaitu kepolisian. Kepolisian harus mengawal dan menjaga aksi demonstrasi mahasiswa dari awal sampai akhir, sehingga demonstrasi tidak melanggar aturan hukum yang ada. Jika setiap demonstrasi yang mengarah dan menjurus pada tindakan kekerasan yang berakibat pada kerusakan fasilitas umum dan dapat merugikan masyarakat, maka kepolisian harus mengamankan dan memproses sesuai aturan hukum bagi pelaku yang melanggarnya. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut, sering mendapat perlawanan dari mahasiswa, akibat adanya perbedaan kepentingan. Dimana masing-masing pihak bersikukuh untuk mempertahankannya, sehingga bentrokan di kedua belah pihak pun tidak dapat dihindari yang menimbulkan banyak kerugian dan korban.

Keadaan tersebut, menunjukkan bahwa budaya demokrasi dalam bentuk kegiatan demonstrasi masih belum berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan Rahayu (2007: 129) bahwa :

Kehidupan demokrasi diwarnai kebebasan, kebersamaan dan kemufatan untuk menyelesaikan permasalahan. Kebebasan yang didukung oleh hak-hak dan kewajiban konstitusi, dasar-dasar hukum, dan cara hidup yang etis, untuk menghindari tirani.

Maksudnya kebebasan dalam berdemonstrasi seharusnya mengacu pada hukum dan nilai etika, sehingga demonstrasi akan berjalan damai untuk membawa kepentingan umum dan menjauhkannya dari pemerintahan yang otoriter dan tirani.

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Demonstrasi harus memiliki aturan hukum yang tegas, sebagaimana yang dikemukakan Dicey (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 97) bahwa “salah satu unsur *rule of law* dalam demokrasi konstitusional yaitu supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) dan tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*)”. Maksudnya hukum ditegakkan bagi siapa saja pelaku yang melanggarnya, baik rakyat kecil maupun sampai pada kaum elit seperti pemerintah, konglomerat, para politisi, dan lain sebagainya, termasuk mahasiswa. Sebaliknya juga, hukum jangan dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya yang absolut (mutlak). Oleh karena itu, pemerintah dalam negara demokrasi harus dibatasi oleh aturan hukum, sebagaimana dikemukakan Budiardjo (2008: 106-107) bahwa “demokrasi mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*Rechtsstaat*) yang tunduk kepada *Rule of Law*”.

Demonstrasi seyogyanya sebagai bentuk tindakan kontrol sosial politik kepada pemerintah harus bersifat konstruktif, agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud (1993: 30) bahwa “salah satu ciri pemerintahan yang demokratis dibawa *rule of law* yaitu kebebasan menyampaikan pendapat”. Kebebasan melalui demonstrasi ini telah dijamin oleh hukum atau Undang-Undang, antara lain: (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*); (2) Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945; dan (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah mengatur bagaimana cara berdemonstrasi yang sebenarnya.

Demonstrasi harus juga berorientasi kepada nilai perubahan (*value political movement*) untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan sebaliknya berorientasi pada kepentingan individu, kelompok, golongan, ataupun pemerintah yang berkuasa (*power political movement*), sehingga nilai-nilai tersebut, dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat umum. Demikian pula, demonstrasi harus didasarkan pada tindakan bermoral dan diarahkan pada perilaku damai atau anti kekerasan, sebagaimana dikemukakan Yoedhanegara (2005: 19) bahwa “demonstrasi dengan jargon-jargon perlawanan harus tetap dikibarkan baik secara kultural maupun struktural untuk tetap disuarakan sebagai perwujudan dalam rangka membangun demokrasi yang sejati di Indonesia”. Artinya melalui demonstrasi yang benar, damai dan berkualitas, maka akan mencapai sebuah demokrasi yang baik sebagaimana harapan semua pihak.

Berangkat dari situasi dan kondisi diatas, maka sangat penting bagi penyusun untuk meneliti sebuah tesis dengan tema **“Perilaku Kekerasan Mahasiswa dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum melalui Demonstrasi (Studi Kasus Mahasiswa Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini, yaitu demonstrasi mahasiswa yang berakhir dengan keributan

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

karena tujuan demonstrasi tidak terencana dengan baik. Pada saat demonstrasi berlangsung, mahasiswa kadang-kadang tidak terkontrol, tidak sabar, lemahnya komunikasi atau negosiasi, mudah terprovokasi, dan sangat emosional dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berkembang dalam demonstrasi, sehingga kekerasan sebagai alat atau cara yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai tujuan demonstrasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah pokok penelitian ini, yaitu “mengapa mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi berujung pada perilaku kekerasan?”.

Agar penelitian ini terarah dan mengingat luasnya permasalahan tersebut, maka masalah pokok tersebut peneliti batasi dalam rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai penyampaian pendapat di muka umum melalui demonstrasi?
2. Apa yang menjadi motivasi utama mahasiswa untuk melakukan demonstrasi?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan demonstrasi mahasiswa berujung pada perilaku kekerasan?
4. Bagaimana mekanisme yang ditempuh mahasiswa dalam melakukan demonstrasi yang berujung pada perilaku kekerasan?

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

5. Bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang diterima mahasiswa yang melakukan demonstrasi dengan cara kekerasan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai mengapa mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi umumnya berujung pada perilaku kekerasan.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

- a. Pemahaman mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi.
- b. Motivasi utama mahasiswa untuk melakukan demonstrasi.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan demonstrasi mahasiswa berujung pada perilaku kekerasan.
- d. Mekanisme yang ditempuh mahasiswa dalam melakukan demonstrasi yang berujung pada perilaku kekerasan.
- e. Konsekuensi-konsekuensi yang diterima mahasiswa yang melakukan demonstrasi dengan cara kekerasan.

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teoritik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menanamkan kepada mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi dapat berlangsung damai.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan pengalaman peneliti, selaku pribadi yang senang berkecimpung dalam organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.
- b. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk pertimbangan bagi pimpinan lembaga perguruan tinggi/universitas dalam membuat sebuah kebijakan terkait dengan pengaturan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi.
- c. Bagi organisasi intra dan ekstra kemahasiswaan, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pelaksana/pengurus organisasi intra dan ekstra kemahasiswaan, agar lebih mengavaluasi diri terhadap arah perjuangan dan pergerakan mahasiswa dalam melanjutkan agenda-agenda reformasi.
- d. Bagi Pemerintah dan Kepolisian, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk pertimbangan bagi pemerintah setempat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, dan juga pihak kepolisian dalam membuat sebuah kebijakan

Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

terkait pengaturan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi.



Wahyudin Noe, 2012

Perilaku Kekerasan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Melalui Demonstrasi

: Studi Kasus Mahasiswa di Kota Makassar dalam Kegiatan Demonstrasi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu